

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMPERSAL
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat



Oleh

Sri Sumarni
KMP.19.00083

**PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
WIRA HUSADA YOGYAKARTA
2021**



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMPERSAL
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019**

Disusun Oleh:

Sri Sumarni

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal.....

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama/Penguji I

Pembimbing Kedua/Penguji II

Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M.,M.P.H Nasiatul Aisyah Salim, S.K.M.,M.P.H.

Penguji III

Ronald, S.K.M., M.Kes

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, 18 Agustus 2021

Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)



Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M.,M.P.H





PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di Bawah ini,

Nama : Sri Sumarni
Nomor Induk Mahasiswa : KMP. 1900083
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi : Administrasi Kebijakan Kesehatan
Angkatan : 2019/2021

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penyusunan skripsi dengan judul :

Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Purworejo Tahun 2019

adalah hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta maupun di institusi lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tidak benar maka saya siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan kelulusan dan pencabutan ijazah beserta gelar yang melekat.

Yogyakarta,.....18 Agustus 2021

Mengetahui

Ketua Dewan Penguji,

Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M.,M.P.H

Yang Menyatakan



Sri Sumarni

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Purworejo”.

Draf skripsi ini disusun dalam rangka penyusunan skripsi. Skripsi ini mempelajari tentang implementasi kebijakan program jampersal di Kabupaten Purworejo

Dalam penyusunan skripsi banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Dra. Ning Rintiswati, M.Kes., selaku ketua STIKES Wira Husada Yogyakarta yang telah memberi izin penelitian.
2. Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H., selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) dan sebagai dosen pembimbing utama atas arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Nasiatul Aisyah Salim, S.K.M.,M.P.H., selaku dosen pembimbing pendamping atas arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ronald, S.K.M., M.Kes., selaku dosen penguji atas arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat atas bekal ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis melaksanakan studi.

6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM. atas izin penelitian yang telah diberikan

Draf skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, kritik dan masukan sangat penulis harapkan demi sempurnanya. Semoga skripsi ini bermanfaat..

Yogyakarta, Juli 2021

Penulis

Sri Sumarni

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMPERSAL DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

Sri Sumarni¹, Dewi Ariyani Wulandari², Nasiatul Aisyah Salim³

ABSTRAK

Latar Belakang: Program Jampersal di Kabupaten Purworejo untuk mendekatkan akses pelayanan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dalam rangka untuk menurunkan AKI dan AKB. Anggaran Program Jampersal pada tahun 2018 tidak mencukupi sampai akhir tahun. Sedang realisasi anggaran Program Jampersal tahun 2019 sebesar 44%. Kabupaten Purworejo menerbitkan Peraturan Bupati Jampersal sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Jampersal pada tanggal 13 Agustus 2018.

Tujuan: Mengetahui Implementasi Program Jampersal Kabupaten Purworejo di PPK I dan PPK II terkait persyaratan, pelayanan dan Pengajuan klaim.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data kuantitatif dengan kuesioner dan pengumpulan data kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada informan kunci. Jumlah Informan kunci berjumlah 4 orang yaitu 2 informan kunci dari pengelola Jampersal PPK I yang paling tinggi permasalahan dan paling rendah permasalahannya, 2 orang informan kunci dari pengelola Jampersal PPK II yang paling tinggi permasalahannya dan paling rendah permasalahannya. Teknik analisa data kuantitatif dengan distribusi frekuensi diatas nilai mean sesuai dan dibawah nilai mean tidak sesuai untuk persyaratan, pelayanan dan klaim. Teknik analisa data kualitatif menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil: Persyaratan Program Jampersal di PPK I 55,6% sesuai, 44,4% tidak sesuai, Persyaratan di PPK II 50% sesuai, 50% tidak sesuai, Pelayanan Program Jampersal PPK I 55,6% sesuai, 44,4% tidak sesuai. Pelayanan PPK II 50% sesuai, 50% tidak sesuai, Klaim PPK I 66,7% sesuai, 33,3% tidak sesuai, Klaim PPK II 75% sesuai, 25% tidak sesuai. Hasil penelitian kualitatif PPK I dan PPK II didapatkan kurang optimal dalam sosialisasi Program Jampersal, Prosedur berjenjang yang belum dilakukan, Pengajuan klaim yang tidak tepat waktu.

Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Persyaratan di PPK I 55,6% sesuai, 44,4% tidak sesuai, Persyaratan di PPK II 50% sesuai, 50% tidak sesuai. Pelayanan di PPK I 55,6% sesuai, 44,4% tidak sesuai. Pelayanan di PPK II 50% sesuai, 50% tidak sesuai, Klaim di PPK I 66,7% sesuai, 33,3% tidak sesuai, Klaim di PPK II 75% sesuai dan 25% tidak sesuai

Kata Kunci: Implementasi Program Jampersal, PPK I, PPK II

¹Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

²Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

³Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

JAMPERSAL PROGRAM POLICY IMPLEMENTATION IN PURWOREJO DISTRICT IN 2019

Sri Sumarni¹, Dewi Ariyani Wulandari², Nasiatul Aisyah Salim³

ABSTRACT

Background: The Jampersal program in Purworejo Regency is to bring closer access to services for pregnancy, childbirth, postpartum and newborns in order to reduce MMR and IMR. Jampersal Program budget in 2018 is not sufficient until the end of the year. Meanwhile, the realization of the Jampersal Program budget in 2019 was 44%. Purworejo Regency issued the Jampersal Regent Regulation as a Guide to the Implementation of the Jampersal Program on August 13, 2018.

Objective: To know the implementation of the Jampersal Program in Purworejo Regency in PPK I and PPK II related to requirements, services and filing claims.

Methods: This study uses a qualitative-qualitative method with a case study approach. Quantitative data collection techniques using questionnaires and qualitative data collection using in-depth interviews with key informants. The number of key informants is 4 people, namely 2 key informants from Jampersal PPK I management who have the highest problems and the lowest problems, 2 key informants from Jampersal PPK II managers who have the highest problems and the lowest problems. Quantitative data analysis technique with a frequency distribution above the mean value is appropriate and below the mean value is not suitable for requirements, services and claims. The qualitative data analysis technique uses triangulation of data sources.

Result: Jampersal Program Requirements in PPK I 55.6% are appropriate, 44.4% are not appropriate, Requirements in PPK II are 50% appropriate, 50% are not suitable, Jampersal Program Services PPK I 55.6% are appropriate, 44.4% are not. PPK II services are 50% appropriate, 50% are not appropriate, PPK I claims are 66.7% appropriate, 33.3% are not appropriate, PPK II claims are 75% appropriate, 25% are not. The results of the qualitative research of KDP I and PPK II were found to be less than optimal in the socialization of the Jampersal Program, tiered procedures that have not been carried out, and filing of claims that are not timely

Conclusion: Implementation of the Jampersal Program Policy in Purworejo Regency in 2019 Requirements in PPK I 55.6% are appropriate, 44.4% are not appropriate, Requirements in PPK II are 50% appropriate, 50% are not. Services in PPK I 55.6% are appropriate, 44.4% are not appropriate. Services in PPK II 50% are appropriate, 50% are not appropriate, Claims in PPK I 66.7% are appropriate, 33.3% are not appropriate, Claims in PPK II are 75% appropriate and 25% are not appropriate

Keywords: Jampersal Program Implementation, PPK I, PPK II

1Student of Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

2Lecturer of the Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

3Lecturer of the Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
GLOSARIUM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Telaah Pustaka	13
1. Jampersal	13
2. Pelaksanaan Jampersal di Kab. Purworejo	18
3. Syarat Pokok Pelayanan.....	21
4. Syarat pokok Pembiayaan Kesehatan	22
5. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan.....	23
6. Pengertian Monitoring.....	25
7. Tujuan Monitoring	26
8. Data dan Informasi untuk Monitoring	26
9. Jenis Monitoring	27

10. Pendekatan Monitoring	27
11. Keberhasilan Kebijakan	28
E. Landasan Teori	29
F. Kerangka Konsep.....	30
G. Pertanyaan Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Instrumen dan Alat Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Variabel dan Definisi Operasional.....	36
G. Pengelolaan dan Analisis Data	36
H. Keabsahan Data.....	39
I. Jadwal Penelitian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Tempat Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	62
D. Keterbatasan Penelitian	72
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Variabel dan Definisi Operasional Pelaksanaan Jampersal	36
Tabel 4.1	Karakteristik Responden PPK I	48
Tabel 4.2	Karakteristik Responden PPK II	49
Tabel 4.3	Persentase Observasi Permasalahan Persyaratan di PPK I	51
Tabel 4.4	Persentase Observasi Permasalahan Pelayanan di PPK I	52
Tabel 4.5	Persentase Observasi Permasalahan Klaim di PPK I	53
Tabel 4.6	Persentase Observasi Permasalahan Persyaratan di PPK II	54
Tabel 4.7	Persentase Observasi Permasalahan Pelayanan di PPK II	55
Tabel 4.8	Persentase Observasi Permasalahan Klaim di PPK II	56
Tabel 4.9	Pelaksanaan Jampersal di PPK I	57
Tabel 5.0	Pelaksanaan Jampersal di PPK II	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Data Pelayanan Jampersal tahun 2018 dan 2019	2
Gambar 2 Jumlah AKI dan AKB di Kab. Purworejo tahun 2016-2019	3
Gambar 3 Realisasi Anggaran Program Jampersal	5
Gambar 4 Landasan Teori	29
Gambar 5 Kerangka Konsep	30
Gambar 6 Kerangka Permasalahan di PPK I	62
Gambar 7 Kerangka Permasalahan di PPK II	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Persetujuan	79
Lampiran 2 Surat Permohonan Menjadi Responden	80
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	81
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 5 Pengantar Penelitian	87
Lampiran 6 Surat Keterangan Kelaikan Etik	89
Lampiran 7 Surat Ijin Melakukan Penelitian	90
Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian	91
Lampiran 9 Surat izin Riset/Survey/PKL	92
Lampiran 10 Hasil Olah Data Kuantitatif	93
Lampiran 11 Hasil Wawancara Informan Penelitian	94

GLOSARIUM

SPM	: Surat Pernyataan Miskin
SKM	: Surat Keterangan Miskin
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
DAK	: Dana Alokasi Khusus
PerBup	: Peraturan Bupati
Jampersal	: Jaminan Persalinan
KB	: Keluarga Berencana
DinSOS	: Dinas Sosial
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	: Rumah Sakit Umum Pusat
PPK	: Pemberi Pelayanan Kesehatan
RTK	: Rumah Tunggu Kelahiran
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
SDM	: Sumber Daya Manusia
BBL	: Bayi Baru Lahir
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
ANC	: Antenatal Care
PNC	: Post Natal Care

BAB I

PENDAHULUAN

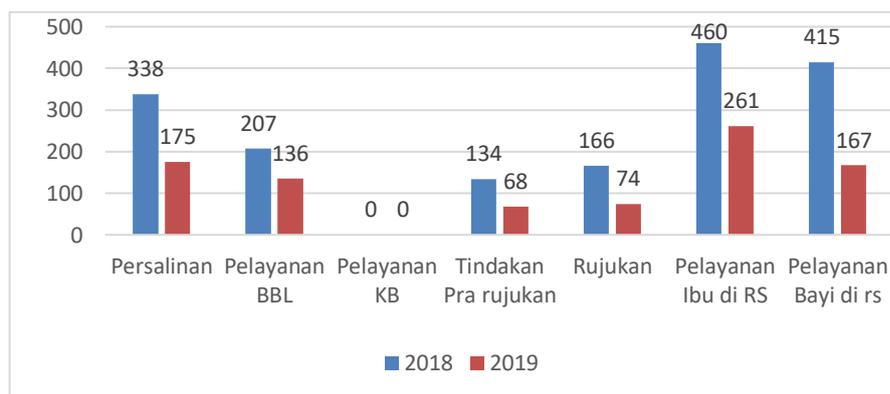
A. Latar Belakang

Jaminan persalinan (Jampersal) merupakan salah satu kebijakan pembiayaan yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Jaminan ini berlaku untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III. Jaminan pembiayaan persalinan meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir (Kemenkes, 2017).

Pelaksanaan Program Jampersal di Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2018. Menurut Data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, anggaran program Jampersal tahun 2018 sebesar Rp 2.109.705.000,00. Namun, bulan Oktober 2018 anggaran telah habis. Hal ini dikarenakan penerima Jampersal cukup dengan mengurus surat pernyataan

miskin dan surat keterangan miskin dari kepala desa/lurah tanpa mempersyaratkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai verifikasi kriteria miskin dan tidak mampu yang bisa dijamin oleh program Jampersal.

Sesuai Juknis dan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo tentang program jampersal menyatakan bahwa program Jampersal digunakan untuk pelayanan paket persalinan, perawatan bayi baru lahir normal/bermasalah, pelayanan KB pasca salin, tindakan pra rujukan dan transport rujukan. Program jampersal tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan kehamilan di PPK I melainkan hanya bisa dilakukan untuk pemeriksaan kehamilan, nifas dan neonatal dengan komplikasi yang membutuhkan pemeriksaan di rumah sakit dan harus sesuai prosedur dan berjenjang. Penelitian Sukri, M (2016) menjelaskan bahwa hasil utilisasi review Program Jampersal di RSUD Muhammadiyah Delanggu angka SC tingkat pemanfaatannya paling tinggi yaitu diatas 40 % dari total ibu hamil dikarenakan tidak adanya pembatasan akses pasien jampersal.



(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo)

Gambar 1 Data Pelayanan Jampersal Tahun 2018 dan 2019

Gambar 1 menjelaskan bahwa tahun 2019 semua pelayanan mengalami penurunan dibanding tahun 2018 terutama pelayanan di rumah sakit. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya kebijakan baru dari Bupati Kabupaten Purworejo terkait adanya perbedaan dalam persyaratan program Jampersal.



(Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo)

Grafik 2 Data Realisasi Anggaran Program Jampersal

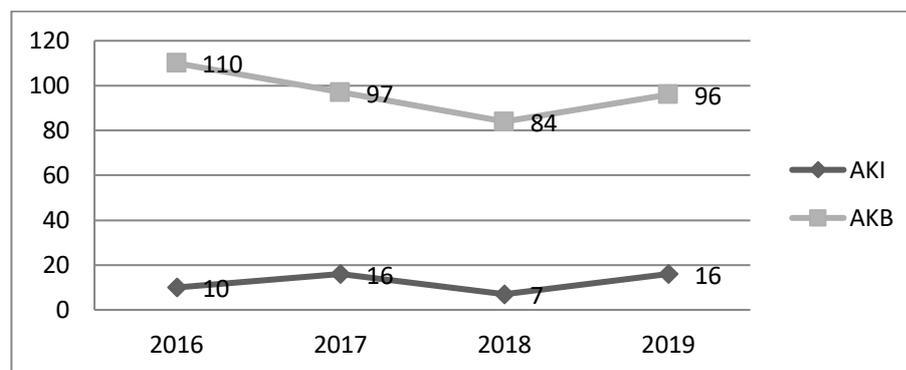
Gambar 2 menjelaskan bahwa menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, anggaran program Jampersal kabupaten Purworejo tahun 2019 sebesar Rp 3.260.000.000. Anggaran tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Namun, realisasi dana yang terserap sebesar Rp 1.431.201.041 yaitu 44 %. Sedangkan anggaran pada tahun 2018 realisasinya pada bulan Oktober sudah terserap semua sejumlah Rp 2.109.705.000. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persyaratan pada pelaksanaan Jampersal bagi pasien rujukan Jampersal di PPK I dan PPK Lanjutan. Pada Peraturan Bupati No 57 tahun 2018, PPK I hanya mensyaratkan adanya surat pernyataan miskin dan surat keterangan miskin yang diverifikasi oleh ketua RT, Kepala Desa dan Camat. Namun, di PPK II mensyaratkan adanya surat rekomendasi dari

Dinas Sosial. Sehingga ditemukan pasien bisa terlayani di PPK I menggunakan Jampersal meski tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Penelitian Panai dan Hendratini (2014) menjelaskan bahwa masyarakat tidak memanfaatkan Jampersal di Kabupaten Bone disebabkan kurangnya sosialisasi, adat dan kebiasaan masyarakat, ketersediaan layanan persalinan berupa kesiapan petugas dan fasilitas pelayanan persalinan, serta rumitnya proses administrasi pengklaiman dana Jampersal. Sedangkan Penelitian Shoima dan Utarini (2013) menjelaskan bahwa jampersal telah mampu mengurangi beban finansial namun belum dapat secara keseluruhan menghilangkan *financial barrier* karena masyarakat masih memiliki social barrier ketika menggunakan Jampersal seperti rasa malu mendatangi bidan atau petugas kesehatan, koordinasi antara pihak kesehatan dengan pemerintah daerah setempat mengenai pelaksanaan program Jampersal belum harmonis. Penelitian Setianingrum dan Hasanbasri (2013) menjelaskan bahwa ibu hamil peserta Jampersal pada umumnya merasa puas dengan integrasi pelayanan *antenatal care*, namun pada kecepatan pelayanan dan kepastian petugas, belum sesuai dengan harapan. Sedangkan penelitian Darmawin, Muhlis M, Nuryanti M (2017) menjelaskan bahwa hal yang sangat pokok dalam kebijakan jaminan persalinan adalah pembenahan akses kualitas pelayanan persalinan. Peran pemerintah juga berpengaruh besar dalam program ini, peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mensukseskan kebijakan tersebut, terutama dalam sumber daya manusia yang dapat bekerja

dengan profesionalitas dalam melakukan pelayanan publik. Isabela M, Dasuki D, Wahab A (2018) menjelaskan bahwa Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang untuk memanfaatkan Jampersal dibandingkan ibu yang aksesibilitasnya sulit. Faktor lain yang turut berhubungan yaitu pendidikan ibu, status ANC, tingkat sosial ekonomi dan pengetahuan ibu tentang Jampersal sedangkan kepemilikan askes/jamkes tidak berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal.

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purworejo yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Jampersal dengan PPK I sebanyak 27 puskesmas, PPK II sebanyak 5 Rumah sakit yaitu RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, RSU Aisyiyah Purworejo, RS Palang Biru Kutoarjo, RS Islam Purworejo dan RS Panti Waluyo Purworejo. Dan PPK III yaitu RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.



(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo)
 Gambar 3 Jumlah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2019

Gambar 3. Menjelaskan bahwa angka kematian ibu di tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Kematian ibu di tahun

2019 terjadi di pelayanan rumah sakit dengan beberapa penyebab kematian yaitu 8 kasus karena penyakit penyerta/ non obstetrik, 5 kasus karena perdarahan, 1 kasus karena pre eklamsi berat, 1 kasus karena emboli dan 1 kasus karena post partum blues. Semua kematian ibu ini tidak menggunakan Jampersal. Kematian ibu terjadi di Kecamatan Bruno (2 kasus), Kecamatan Ngombol (2 kasus), Kecamatan Gebang (3 kasus), Kecamatan Dadirejo (1 kasus), Kecamatan Bubutan (1 kasus), Kecamatan Banyuurip (2 kasus), Kecamatan Bayan (1 kasus), Kecamatan Pituruh (1 kasus), Kecamatan Banyuasin (2 kasus) dan Kecamatan Purworejo (1 kasus).

Menurut sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Puskesmas yang menemukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program Jampersal sebanyak 11 puskesmas yaitu Puskesmas Bruno, Puskesmas Bener, Puskesmas Banyuurip, Puskesmas Gebang, Puskesmas Bayan, Puskesmas Sruwohrejo, Puskesmas Butuh, Puskesmas Grabag, Puskesmas Butuh, Puskesmas Purworejo, Puskesmas Pituruh dan Puskesmas Banyuasin. Sedangkan PPK II yang menemukan permasalahan dalam pelaksanaan program jampersal ada 4 rumah sakit yaitu rumah sakit RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo, RS palang Biru, RS Aisyiyah dan RS panti waluyo Purworejo. Dalam pelaksanaan program Jampersal di PPK I dan PPK II ditemukan permasalahan yaitu pertama, pasien datang ke rumah sakit belum membawa persyaratan dan baru mengurusnya setelah masuk rumah sakit. sehingga ketika pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit, persyaratan masih belum bisa dipenuhi. Kedua, persyaratan Jampersal di

Puskesmas cukup dengan SKM (Surat Keterangan Miskin) yang di verifikasi ketua RT sedangkan ketika pasien memerlukan tindakan rujukan ke rumah sakit membutuhkan surat rekomendasi dari dinas sosial yang mana belum tentu mendapat rekomendasi karena hasil verifikasi tidak memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu.

Permasalahan tersebut diatas, PPK I dan PPK II sering menelpon Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo untuk mengambil keputusan dan persetujuan jaminan Jampersal atas permasalahan pasien karena misalnya persyaratan sudah lengkap tetapi syarat pemenuhan 2x24 jam tidak dipenuhi dan tidak sesuai peraturan yang berlaku di Peraturan Bupati Jampersal. Kebijakan yang jelas akan berpengaruh pada implementasi di lapangan karena kebijakan kesehatan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kualitas kesehatan, hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Purworejo setelah adanya Peraturan Bupati Jampersal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan Program Jampersal setelah adanya Peraturan Bupati Jampersal di Kabupaten Purworejo ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi Kebijakan Program Jampersal setelah adanya Peraturan Bupati Jampersal di kabupaten Purworejo.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran implementasi persyaratan berkas Program Jampersal di Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui gambaran implementasi tingkat pelayanan Program Jampersal di Kabupaten Purworejo.
- c. Untuk mengetahui gambaran implementasi pengajuan klaim Program Jampersal di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

1 Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Jampersal

2 PPK I Program Jampersal

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi PPK I dalam memberikan pelayanan program jampersal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3 PPK II Program Jampersal

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi PPK II dalam memberikan pelayanan Rujukan Program Jampersal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

4 STIKES Wira Husada Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan tentang penelitian kesehatan khususnya penelitian tentang kebijakan Jampersal

5 Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian memahami kebijakan Jampersal.

E. Keaslian Penelitian

1. Fahri Nugraha dkk. 2019 *Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi*. Metode penelitian adalah metode mix metode. Jumlah sampel 2 yaitu pertama, sampel aparat yaitu sampling jenuh atau sensus, kedua yaitu masyarakat diambil dengan sampling Incidental sebanyak 88 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Analisis data dengan analisa data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Jampersal Di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi berjalan dengan optimal meski kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program jampersal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang implementasi program jampersal. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian, teknik pengambilan sampel, jumlah sampel, analisa hasil penelitian dan tempat penelitian.

2. Hendi A & Lilis S. 2017 *Analisis pelaksanaan program jaminan persalinan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*. Jenis penelitian adalah kualitatif. Jumlah informan sebanyak 7 orang meliputi Kepala Puskesmas, Bidan koordinator, Bendahara Jaminan Kesehatan, Bidan Pelaksana di Puskesmas Pekan Heran, Kepala bidang Promosi kesehatan dan KIA - Kesga, Kasi Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan kabupaten Indragiri Hulu, Bidan Desa dan Pengguna pelayanan Jampersal. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Pengolahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian didapatkan bahwa pendataan, sosialisasi, pendanaan dan pelaksanaan program Jampersal di Puskesmas Pekan Heran Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlaksana dengan baik dalam hal pendataan program jampersal yang masih rendah, sosialisasi program jampersal yang belum merata dan dalam pelaksanaan program jampersal belum didukung oleh juknis atau kebijakan dari Dinas kesehatan Kabupaten atau daerah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang program jampersal. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian, metode analisa hasil penelitian dan tempat penelitian.
3. Darmawin, Muhlis M, Nuryanti M., 2017 *Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Pelitakan Kabupaten Polewali Mandar*. Jenis penelitian adalah kualitatif. Jumlah informan sebanyak 8 orang. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara, observasi

langsung, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang sangat pokok dalam kebijakan jaminan persalinan adalah membenahan akses kualitas pelayanan persalinan. Peran pemerintah juga berpengaruh besar dalam program ini, peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mensukseskan kebijakan tersebut, terutama dalam sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan profesionalitas dalam melakukan pelayanan publik. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang Program jampersal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian, metode analisa hasil penelitian dan tempat penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran persyaratan program jampersal di PPK I Kabupaten Purworejo yaitu 55,6 % telah memenuhi persyaratan dan 44,4% tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan 50 % PPK II telah memenuhi persyaratan dan 50 % PPK II tidak memenuhi persyaratan.
2. Gambaran Tingkat pelayanan program jampersal di PPK I yaitu 55,6 % memberikan pelayanan Jampersal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan 44,4 % PPK I memberikan pelayanan Jampersal tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jampersal. Sedangkan untuk PPK II yaitu 50 % dengan memberikan pelayanan jampersal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 50 % PPK II memberikan pelayanan Jampersal tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jampersal.
3. Gambaran pengajuan klaim program jampersal di PPK I yaitu 66,7 % PPK I pengajuan klaim telah memenuhi persyaratan dan 33,3 % PPK I pengajuan klaim tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan 75 % PPK II pengajuan klaim telah memenuhi persyaratan dan 25 % PPK II pengajuan klaim Jampersal tidak memenuhi persyaratan.

B. Saran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Pengajuan perubahan Peraturan Bupati tentang Jampersal terkait persyaratan PPK I dan PPK II dengan mensyaratkan adanya surat rekomendasi sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan persyaratan.

2. PPK I Program Jampersal

Diharapkan PPK I memberikan sosialisasi rutin ke masyarakat dan memberikan sosialisasi persyaratan Jampersal melalui media cetak berupa banner/ leaflet/brosur.

3. PPK II Program Jampersal

Diharapkan PPK II melakukan komunikasi ke pasien terkait persyaratan untuk mendapatkan pelayanan di PPK II dan memberikan sosialisasi persyaratan Jampersal dengan media cetak.

4. STIKES Wira Husada Yogyakarta

Dapat memberikan pengetahuan penjaminan kesehatan khususnya jaminan persalinan.

5. Peneliti Lain

Dapat melanjutkan penelitian terkait program jampersal dengan melakukan triangulasi pada peserta program Jaminan Persalinan. Dan meneliti selain persyaratan, pelayanan dan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2014). Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Tuban. *Jurnal Cakrawala*. 8(1). 23-32.
- Amsyah, K, (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, Media Citra Mandiri Press, Bandung.
- Azwar, A, (1996). *Pengantar Administrasi Kesehatan*, PT Bina Rupa Aksar, Jakarta
- Anyaprita D, Kemal, Siregar, Hartono B, Fachri M, Aryanti F., (2020). Dampak Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Mutu Pelayanan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. *Jurnal Muhammadiyah Public Health*. 1(2).22-31.
- Darmawin, Muhlis M, Nuryanti M., (2017). Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Pelitakan Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(2).178-192.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Fahri Nugraha dkk. (2019). Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Administrasi Publik*. 2(1).15-21.
- Fitri Dwita R, Khoiri A, Kusworini D, (2021). Evaluasi Program Jampersal di Puskesmas Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember 2012. *Jurnal Pustaka Kesehatan*. 2(2).353-360.
- Handayani S, Yuliani F., Implementasi Program Jaminan Kesehatan Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 1(3).249-253.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Helmizar. (2014). Evaluasi Kebijakan Jampersal dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.2(2). 197-205.
- Hendi A & Lilis S. (2017). Analisis Pelaksanaan Program Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. *Publika*. 3(2).262-282.

- Hidayat Sarip, Utarini Adi. (2013). Kepuasan Bidan Terhadap Sistem Pembayaran Jampersal Di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB. *Tesis. S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Universita Gadjah Mada.*
- Isabela, M., Dasuki, D., & Wahab, A. (2018). Evaluasi Pemanfaatan Jaminan Persalinan di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 07(03), 140–146.
- Mukhlisa Mazda, Yoga I, Tristiana N, Estetika R, Haryani W. (2019) Evaluasi Implementasi Jaminan Persalinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*. 5(2).89-101.
- Mulyati I, Buana C, Juniarti P. (2012). Evaluasi Pelayanan Program Jampersal: Tinjauan Dimensi Mutu Pelayanan Jampersal. *Jurnal Media Kesehatan*. 6(2). 180-183.
- Munaili S, Syafriyani I, Harto A. (2020). Kualitas Pelayanan Program Jampersal Melalui Sistem Klaim (Reimburseemen) Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). *Jurnal Publick Corner Fisip Universitas Wiraraja*.15(2).38-48
- Mustopadidjaja, AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN Kerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation, Jakarta.
- Nugraheni W, Muhasyroh R, Kusuma R. (2019). Peran Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mengurangi Beban Keuangan pada Perawatan Persalinan. *Jurnal Kemenkes*. Litbangkes.
- Nuryati Rina, Hasanbasri Mubasysyir. (2013). Kualitas Pelayanan Kb Pasca Salin Pasien Jampersal Di Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, *Tesis. S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat.*
- Panai Roos, Hendratini Julita. (2014). Hambatan Pemanfaatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, *Tesis.S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat.*
- Kemenkes. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143840/permenkes-no-61-tahun-2017>
- Rahman H, Bangun M. (2021) Analisis Implementasi Program Jaminan Persalinan di Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai Tahun 2019. *Jurnal Darma Agung*. 29(1). 57-67.

- Rahmat B. (2020) Pengaruh Implementasi Kebijakan Kesehatan Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Syntax Idea* 2(3).1-11.
- Richard Budd, et al. (1969) *Content Analysis of Communication*, (New York: The Mac Millan Company), page: 2
- Rukmini, Rachmawaty T, Dwilaksono A. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. *Kementrian Kesehatan*. 1(1). 154-167.
- Sagala I. Trishantoro L, Padmawati S,. (2016). Implementasi Kebijakan JKN di Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. 5(3). 115-121.
- Sardjoko, S. (2019). *Pembiayaan Kesehatan dan JKN*. Kementrian PPN/ Bappenas. Jakarta.
- Setianingrum Veronika Evita, Hasanbasri Mubasysyir. (2013). Implementasi Jampersal Di Pelayanan Primer Studi Kasus Integrasi Pelayanan Antenatal Care Puskesmas Dan Bidan Praktek Mandiri Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, *Tesis. S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Setyawan Indra, Claramita Mora. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Satu Tahun Jampersal Di Kota Ternate Maluku Utara Tahun 2011: Deskripsi Cakupan Jampersal, *Skripsi. pendidikan dokter*.
- Shoima Nur Falakhis, Utarini Adi. (2013). Persepsi Masyarakat Tentang Jampersal Di Kabupaten Jember, *Tesis.S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Solekah S, Hakimi M, Claramita M, (2017). Persepsi Bidan Praktek Mandiri Terhadap Paket Persalinan BPJS Dalam Keberlangsungan Kerjasama Menjadi Provider dalam Jejaring Dokter Keluarga Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Indonesia Fakulta Ilmu Kedokteran Universitas Gadjah Mada*, 1(6) 38-46.
- Siswati Dina E, (2014). Pengaruh Kompensasi-Insentif Jaminan Persalinan (Jampersal) Terhadap Kinerja Bidan Di Puskesmas Kabupaten Sumbawa Melalui Motivasi Sebagai Intervening. *Tesis. Universitas Terbuka*. Jakarta.
- Subarsono, AG. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukri Muhammad Makmun. (2016). Dampak Tiga Jenis Sistem Pembiayaan (Out Of Pocket, Jampersal Dan Jkn) Terhadap Tindakan Sectio Caesaria Di Rsu Pku Muhammadiyah Delanggu, *Tesis S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Triyuniningsih. (2017). Kebijakan Jampersal Sebuah Upaya Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Undip*. 5(2). 78-87
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wulandari Ritriani I. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.